

Kegagalan Empat Negara Arab dan Keberhasilan Indonesia dalam Masa Transisi Demokrasi

Indriana Kartini

Lembaga Penelitian Indonesia Bidang Politik Internasional

ABSTRAK

Ide demokrasi di dunia Arab mulai ditanamkan kembali dalam pemerintahan setelah serangkaian popular uprising yang terjadi sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan politik. Peristiwa Arab Uprising yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2011 menjadi momentum bagi proses demokratisasi. Jatuhnya rezim otoritarian di Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman oleh gerakan popular uprising mengantarkan negara-negara tersebut memasuki fase transisi dari pemerintah otoritarian ke bentuk pemerintahan lain. Variabel analisis yang dipakai adalah "good old time of order", "social peace" and "respect for authority". Fenomena yang terjadi di empat negara Arab dan Indonesia dianalisis dalam tulisan ini untuk mengetahui arah transisi politik suatu negara yang menuju proses demokratisasi maupun yang berujung pada perang saudara.

Kata Kunci: Arab Uprising, demokratis, Tunisia, Mesir, Suriah, Libya, Indonesia, Orde Baru

Democratic idea in the Arab World has been replanted in the government after a series of popular uprising which happened spontaneously as a response to economic and political crisis. The Arab Uprising in the Middle East and North Africa in 2011 has become an important moment from democratization process. The downfall of authoritarian regimes in Tunisia, Egypt, Libya, and Yemen by the movement of popular uprising has made those countries entered transition phase from authoritarian into another form of government. Variable analysis used are "good old time of order", "social peace" and "respect for authority". A phenomenon that occurs in four Arab countries and Indonesia will be analyzed in this paper to determine the direction of a country's political transition toward democratization process and that led to the civil war.

Keywords: Arab Uprising, democratic, Tunisia, Egypt, Syria, Libya, Indonesia, New Order

Demokratisasi dipahami sebagai proses transisi pemerintahan dari otoritarian menjadi demokratis. Banyak teoritis mengasumsikan bahwa transisi itu mempunyai titik awal dan akhir dengan perubahan yang jelas dan signifikan dan prosesnya dapat diidentifikasi. Asumsi ini dinamakan paradigma transisi dan menurut O'Donnel & Shmitter (1986) terdiri dari tiga tahapan yakni liberalisasi, transisi, dan konsolidasi. Proses transisi telah dialami oleh negara-negara di kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa demokrasi menjadi diskursus dominan di banyak negara dunia.

Setelah serangkaian *popular uprising* sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan memburuknya kondisi kehidupan bernegara, ide demokrasi mulai ditanamkan kembali dalam pemerintahan dan opini publik. Dunia Arab menyaksikan dimulainya era transisi demokratis Arab yang merupakan hasil interaksi dari perubahan intelektual baru yang dipengaruhi oleh gerakan protes, sosial, dan religius. Peristiwa *Arab uprising* yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2011 menjadi momentum bagi proses demokratisasi di Dunia Arab. Jatuhnya rezim otoritarian di Tunisia, Mesir, Libya, dan Syria oleh gerakan *popular uprising* mengantarkan negara-negara tersebut memasuki fase transisi dari pemerintah otoritarian ke bentuk pemerintahan lain. Bentuk pemerintahan lain disini bisa dalam bentuk demokrasi serta munculnya revolusi baru.

Seperti yang diungkapkan Fawaz A. Gerges (dalam Perry 2013), Direktur Middle East Center, di London School of Economics, bahwa tidak seperti Eropa Timur di tahun 1980an dan 1990an yang secara jelas menginginkan demokrasi Barat, dunia Arab tampaknya tidak tahu atau mengalami kebingungan menentukan arah demokrasi. Gerges (dalam Perry 2013) menentang asumsi bahwa transisi demokrasi di dunia Arab akan mengarah pada demokrasi *a la* Barat. Fukuyama (dalam Perry 2013) menegaskan bahwa ekspektasi orang terhadap demokrasi terlalu tinggi terkait dengan seberapa cepat suatu negara melewati fase transisi demokrasi. Pengalaman yang terjadi di Timur Tengah tidak berjalan dengan baik, namun demokrasi secara nyata terjadi dan membutuhkan waktu

untuk berkembang. Bagi Fukuyama (dalam Perry 2013), nasionalisme mengakibatkan gagalnya demokrasi pada abad ke-20 di Eropa, dan agama saat ini memainkan peran yang sama di dunia Arab. Demokrasi di beberapa negara akan terlihat berbeda, namun mereka menghadapi tantangan yang sama dan terdapat pola evolusi yang sama.

Transisi Demokrasi

Setelah pemilu parlemen Oktober 2011, Tunisia mencapai fase transisi demokrasi, meski belum mencapai konsolidasi demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari empat perkembangan. Pertama, kesepakatan atas prosedur untuk menghasilkan pemerintahan yang terpilih melalui pemilu. Kedua, hasil langsung dari pemilu bebas. Ketiga, pemerintah telah memiliki, secara *de facto*, otoritas untuk mengeluarkan kebijakan baru. Keempat, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dipilih melalui demokrasi yang baru, tidak perlu berbagi kekuasaan dengan lembaga lain secara *de jure*, seperti militer dan pemimpin agama (Stepan 2012).

Partai Annahdah yang memenangkan pemilu parlemen Oktober 2011 kemudian mendominasi Majelis Konstituante yang bertugas menyusun UU atau konstitusi negara. Rancangan Undang-Undang (RUU) kemudian diumumkan pada Agustus 2012 yang dalam kesempatan tersebut, pemimpin Annahdah menegaskan bahwa meskipun partainya memenangkan pemilu melalui faktor agama, namun mereka tidak akan menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum dalam konstitusi baru dan akan mempertahankan sifat sekular negara Tunisia. Partai Annahdah menegaskan bahwa pasal pertama dari UU 1956 akan tetap dicantumkan dalam konstitusi baru, yakni:

”Tunisia adalah negara bebas, merdeka, dan berdaulat, agamanya adalah Islam, bahasanya adalah Arab, dan bentuknya adalah sebuah republik. Kami tidak akan menggunakan hukum untuk memaksakan agama” (Peyron 2012).

Setelah hampir dua tahun pemilihan umum, kondisi Tunisia belum stabil. Protes anti-pemerintah pecah di berbagai daerah di Tunisia. Pada 28 September 2013, pemerintah koalisi yang dipimpin oleh Annahdah menyetujui tuntutan untuk mundur setelah kekacauan situasi politik di Tunisia. Menurunnya popularitas Annahdah disebabkan oleh berbagai hal. Pertama, Annahdah dituduh terlalu toleran terhadap golongan Islam radikal yang mengakibatkan terbunuhnya dua orang tokoh oposisi, Mohamed Brahmi pada bulan Juli 2013 dan Chokri Belaid pada bulan Februari di tahun yang sama. Pemerintah dianggap gagal untuk menjalankan fungsi menjaga keamanan di Tunisia, dan mengawal transisi Tunisia kepada era demokrasi. Pembunuhan terhadap dua tokoh oposisi merupakan katalis terjadinya protes setelah berbulan-bulan dilanda rasa frustrasi. Sebagai respon, 50 deputi mengundurkan diri dan berdemonstrasi di depan Majelis Konstituante. Peristiwa pembunuhan tokoh oposisi ini juga semakin memperkuat protes kaum sekular yang menuduh Annahdah memasukkan agenda-agenda Islamis ke dalam pemerintahan Tunisia. Kedua, janji Annahdah untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Tunisia juga belum dapat ditepati. Pertumbuhan ekonomi masih lambat, sektor pariwisata yang menjadi andalan Tunisia belum mengalami pemulihan yang memuaskan. Dalam artikel *Tunisia's Economy* (2013) diungkapkan bahwa tingkat pengangguran masih berada di level 17% dan di daerah-daerah rural, hingga 30% lulusan perguruan tinggi tidak mendapatkan pekerjaan (Kartini 2013).

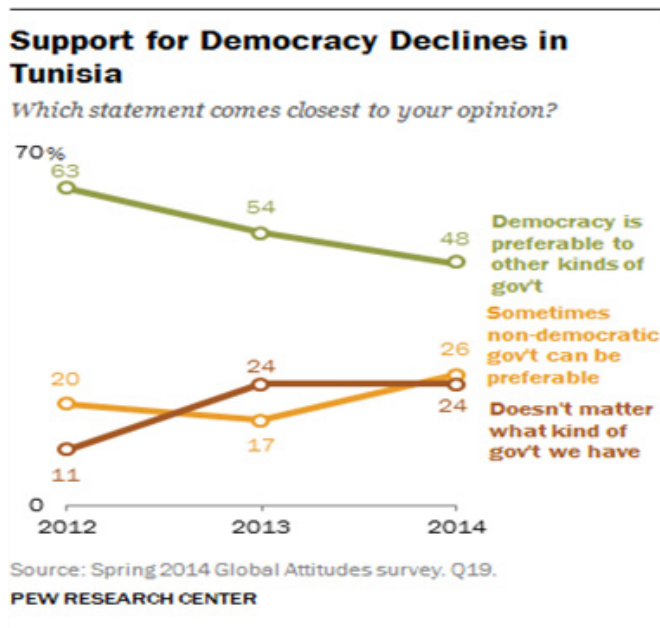
Dinamika politik di Tunisia pada akhir September 2013, menunjukkan bahwa Annahdah sebagai pimpinan koalisi pemerintahan tampak cepat belajar dari kegagalan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dalam artikel *Tunisia, Annahdah Mundur untuk Akhiri Krisis Politik* (2013), diungkapkan bahwa partai Annahdah menyatakan bersedia untuk mundur dari pemerintahan sesuai dengan usulan jalan tengah dari kuartet Uni Serikat Buruh Tunisia (UGTT), *employer's federation*, liga HAM, dan organisasi advokat untuk mengakhiri krisis politik di Tunisia. Mundurnya Annahdah dari pemerintahan bisa dikatakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya spiral

kekerasan seperti yang terjadi di Mesir. Para pemimpin Annahdah khawatir akan mengalami nasib yang sama dengan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. Penggulingan Presiden Mursi dijadikan pelajaran oleh mereka. Kekerasan yang diikuti oleh pelarangan IM oleh pengadilan Mesir menjadi peringatan bagi pemimpin Annahdah bahwa peristiwa yang sama dapat saja terjadi di Tunisia (Kartini 2013).

Mundurnya Perdana Menteri Ali Layaredh dari Partai Annahdah dan digantikan oleh Mehdi Jomaa, seorang teknokrat independen, mengakhiri *deadlock* politik dan memberikan basis untuk membangun Majelis Konstituante yang lebih kooperatif. Dalam hal ini, Annahdah melakukan beberapa konsesi, termasuk mencabut referensi kepada hukum Islam. Teks dalam konstitusi baru melarang penyerangan terhadap hal-hal yang sakral (suci), namun kalimat ini masih tidak jelas karena bisa saja digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara. Kendati demikian, teks ini juga melindungi kebebasan beragama dan melarang penyebutan kepada sesama Muslim sebagai seorang murtad yang sering digunakan oleh kelompok radikal Islam untuk menjustifikasi kekerasan terhadap mereka yang dianggap kurang saleh. Konsitusi juga menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan dengan mengharuskan pemerintah memberlakukan kesetaraan gender di seluruh lembaga legislatif. Konstitusi baru ini merupakan langkah positif dalam transisi demokrasi di Tunisia. Meski konstitusi itu masih belum sempurna, namun dihasilkan dari konsensus. Seperti yang diungkapkan oleh Ben Jaafar, ketua Majelis Tunisia, “We had today a new rendezvous with history to build a democracy founded on rights and equality” (Petrou 2014).

Tunisia dipandang sebagai salah satu negara yang memberi harapan bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, namun perkembangan terkini terjadi penurunan terhadap kepercayaan atas demokrasi sejak periode awal terjadinya *Arab Uprising*. Menarik untuk ditelaah hasil survei yang dilakukan Pew Research Global Attitudes Project (2014) mengenai dukungan rakyat Tunisia terhadap demokrasi, menunjukkan penurunan

dari 63% di tahun 2012 menjadi 48% (lihat gambar 1).¹



Sumber Gambar 1: (PewResearchCenter 2014)

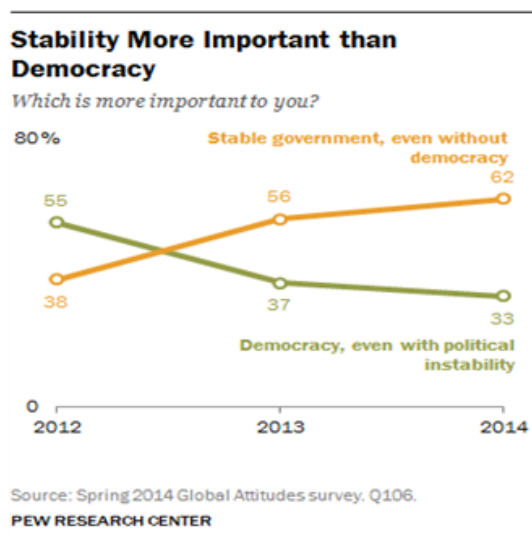
Sementara itu, berdasarkan hasil survei Pew Research Global Attitudes Project (2014) terlihat bahwa pandangan rakyat Tunisia mengenai apakah pemerintahan demokratis atau pemimpin yang kuat dapat menyelesaikan persoalan bangsa, hanya 38% memilih cara demokratis, turun dari 61% di tahun 2012. Sementara dukungan publik atas pemimpin yang kuat meningkat dari 37% menjadi 59%. Namun demikian, meski terjadi penurunan kepercayaan terhadap demokrasi, Tunisia tetap menginginkan berjalannya fitur-fitur kunci dalam sistem demokrasi. Fitur-fitur kunci tersebut ialah peradilan yang jujur, pemilu yang kompetitif, hak untuk memprotes dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Hasil survei Pew Research Global Attitudes Project (2014) juga memperlihatkan ketidakpuasan publik Tunisia yang

¹ Survei ini dilakukan oleh Pew Research Center terhadap 1.000 responden melalui interview langsung yang dilakukan dari 19 April hingga 9 Mei 2014.

dapat dijelaskan sebagian oleh faktor ekonomi, dimana 88% menyatakan situasi ekonomi buruk dan 56% menyatakan sangat buruk. Namun, opini mayoritas masih optimis (56%) bahwa ekonomi akan membaik tahun ke depan. Sementara itu, terjadi pula penurunan popularitas Annahdah, partai moderat Islam yang memimpin pemerintahan koalisi setelah turunnya Ben Ali. Setelah pemilu parlemen Oktober 2014, hanya 31% masih mendukung Annahdah, menurun dari angka 65% di tahun 2012. Penurunan dukungan rakyat tidak hanya terhadap partai Islam, namun terjadi juga pada partai sekular seperti Ettakol dan Partai Kongres. Yang menarik adalah preferensi terhadap demokrasi dari pendukung partai Islam Annahdah yang lebih memilih bentuk pemerintahan yang demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan warga dengan preferensi Islam yang kuat berbanding lurus dengan komitmen mereka terhadap pemerintahan yang demokratis.

Sementara itu, menurut hasil survei Pew Research Global Attitudes Project (2014), sekitar 62% warga Tunisia lebih memilih stabilitas ketimbang pemerintahan yang demokratis. Angka ini meningkat dari 38% di tahun 2012, menjadi 62% di tahun 2014. Tujuh dari sepuluh perempuan (69%) serta 55% laki-laki menyatakan pemerintahan yang stabil lebih penting ketimbang pemerintahan demokratis.



Sumber Gambar 2: (PewResearchCenter 2014)

O'Donnell & Schmitter (1986) mengingatkan bahwa hal yang ditakutkan selama masa transisi dan demokrasi politik adalah terjadinya kudeta militer dan the return to the "good old time" of "order", "social peace", dan "respect for authority". Indikasi ini terjadi di Mesir setelah peristiwa *Arab Uprising* yang dalam proses transisi politiknya dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang lebih demokratis mengalami kudeta militer. Gerakan *Arab Uprising* tidak dilengkapi dengan agenda program yang jelas dalam periode setelah perubahan rezim. Dominasi Partai Islam dalam pemilu, dengan perolehan 67% suara tidak mengejutkan. Sebagai contoh adalah Kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir mampu melindungi dan mempertahankan organisasi mereka di tingkat nasional di bawah pemerintahan otoriter Anwar Sadat dan Husni Mubarak. Bertahun-tahun lamanya, IM mengalami tekanan dari pemerintah. Ketakutan elit pemerintah Mesir terhadap IM dikarenakan IM merupakan gerakan oposisi yang ingin menumbangkan rezim otoriter serta menawarkan alternatif pemerintahan Islam. Oleh karena itu, transisi politik Mesir di bawah kepemimpinan Mursi (IM) dikhawatirkan menggunakan jalan demokratis menuju Tatanan Islam (*Islamic Order/Nizam al-Islam*) yang dilengkapi oleh institusi politik-keagamaan dengan otoritas penerapan hukum Islam (Munhanif 2013). Besarnya jumlah anggota IM di parlemen dan kemampuan organisasionalnya menyebabkan IM memiliki kapasitas untuk melakukan *counter-balance* terhadap militer Mesir dan memenangkan perebutan posisi yang membentuk transisi politik.

Berbagai manuver yang dilakukan oleh pemerintahan Mursi justru menjadi *blunder* bagi dirinya dan IM. Mursi berupaya melemahkan kekuatan militer dengan memecat Jenderal Tantawi dari Dewan Agung Militer (*Supreme Council of the Armed Forces/SCAF*). Mursi juga mengeluarkan dekrit presiden untuk memperkuat posisinya sehingga memicu protes rakyat karena dianggap sebagai langkah otoriter. Setelah dikeluarkannya dekrit presiden, Dewan Konstituante berhasil menyepakati *draft* konstitusi baru dan disetujui oleh rakyat melalui referendum dan disahkan sebagai Konstitusi baru.

Pada peringatan setahun kekuasaan Mursi muncul kelompok yang menamakan diri sebagai Tamarod atau gerakan pembangkangan sipil (*civil disobedience*). Muncul juga gerakan tandingan yang pro-pemerintahan. Adanya pro-kontra terhadap kekuasaan Mursi tersebut dijadikan kesempatan sekaligus pembenaran oleh militer Mesir di bawah komando Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi untuk melakukan kudeta pada Juli 2013 terhadap pemerintahan Mursi yang terpilih secara demokratis (Basyar 2013). Akibat peristiwa kudeta ini, Mesir mengalami kemunduran demokrasi dan statusnya berubah dari negara yang sebagian bebas menjadi negara yang tidak bebas (Freedom House 2014). Setelah kudeta, Mesir mengarah pada pemerintahan anti-demokratis, yang mana terjadi pembunuhan terhadap 1.000 demonstran, penahanan para pemimpin IM, intimidasi terhadap media, pelarangan organisasi non-pemerintah, dan pelanggaran terhadap aturan hukum. Pemerintahan yang didukung militer gagal mencegah meningkatnya militansi kelompok Islam yang melakukan serangan terhadap angkatan bersenjata dan kekerasan sektarian terhadap komunitas Kristen Koptik. Di akhir tahun 2013, terjadi eskalasi penahanan terhadap aktivis sekular dan pernyataan ekstrim pemerintah bahwa IM sebagai organisasi teroris menunjukkan bahwa jargon *roadmap to democracy* yang diusung oleh militer hanya didesain untuk memperkuat kekuasaan otoritarian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada fase transisi demokrasi di Mesir terjadi fenomena *backward bending process* (proses pembalikan kembali) dari pemerintahan demokratis ke arah pemerintahan otoritarian di bawah pemerintahan Al-Sisi (Mashad 2013).

Menarik untuk ditelaah survei “One Year after Morsi’s Ouster, Divides Persist on El-Sisi, Muslim Brotherhood” (2014), yang dilakukan Pew Research pada 10-29 April 2014 mengenai persepsi masyarakat terhadap demokrasi di Mesir. Hasil survei menunjukkan bahwa kebanyakan rakyat Mesir masih menginginkan berjalannya demokrasi. Pada 2014, 59% masyarakat menyatakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik, meskipun angka ini menurun dari 66% tahun 2013 bahkan 71% di tahun 2011. Kebanyakan rakyat Mesir menyatakan pentingnya hidup di negara yang mengakui

hak-hak dasar demokratis, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan pemilu yang jujur dan kompetitif. Namun demikian, ketika ditanya untuk memilih pemerintahan yang demokratis dengan resiko instabilitas atau pemerintahan yang stabil dengan resiko tidak demokratis, sekitar 54% warga memilih stabilitas dan hanya 44% memilih demokrasi. Hal ini berbeda dengan hasil survei tahun 2013 dimana 51% memilih demokrasi, sementara 43% memilih pemerintahan yang stabil.

Confidence in Democracy Ebbs			
	2013	2014	Change
<i>Views of democracy</i>	%	%	
Democracy is preferable	66	59	-7
Non-democratic gov't can be preferable	21	25	+4
Does not matter	11	14	+3
<i>Democracy vs. stability</i>			
Democracy is priority	51	44	-7
Stability is priority	43	54	+11

Source: Spring 2014 Global Attitudes survey. Q19 & Q106.
PEW RESEARCH CENTER

Sumber Gambar 3: (PewResearchCenter 2014)

Perang Saudara

Tragedi terbesar yang dialami kawasan Timur Tengah setelah peristiwa *Arab Uprising* terjadi di Suriah yang jatuh ke dalam perang multilateral serta krisis kemanusiaan akibat tindakan pemerintah yang secara sistemik menggunakan kekerasan ekstrim terhadap demonstran pada tahun 2011. Di antara negara-negara Timur Tengah, Suriah memperoleh skor kebebasan sipil terendah pada 2014 berdasarkan laporan "Freedom in The World Report" (2014). Hal ini merupakan akibat buruknya perlakuan terhadap warga sipil yang harus menghadapi kekerasan dari kombatan dan meningkatnya tingkat kelaparan, penyakit, dan kondisi buruk akibat hidup di pengungsian. Penurunan skor juga terjadi akibat meningkatnya serangan terhadap gereja, penculikan sekaligus pembunuhan terhadap ulama, implementasi hukum syari'ah

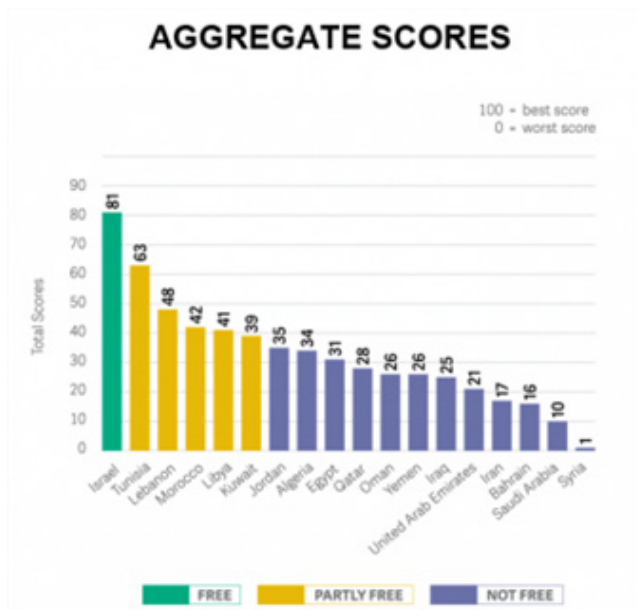
di beberapa wilayah dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk penggunaan pemerkosaan sebagai senjata perang. Protes menyusul terjadinya *Arab Uprising* di Suriah justru menimbulkan krisis politik dan perang saudara antara militer pro Assad dengan milisi bersenjata. Dalam perang ini, pihak pemberontak yang didominasi oleh militan Islam tidak mampu memanfaatkan dukungan Barat melawan rezim otoritarian Bashar Assad. Konflik terjadi di seluruh penjuru negeri seperti Derra di wilayah Selatan, Latakia dan Banias di wilayah sepanjang pantai Mediterania, Homs, Hama di bagian Barat, Deir Az-Zour di bagian Timur, dan Aleppo, kota kedua terbesar di Suriah.

Ketika menghadapi konflik politik di awal terjadinya *Arab Uprising*, elit pemerintahan mengalami perpecahan, dengan mayoritas memilih opsi penyerangan terhadap para demonstran. Akibatnya, kampanye militer oleh pasukan Suriah ditujukan untuk meredam para demonstran yang berbasis di kota di seluruh negeri. Kekerasan yang terjadi direspon oleh pemerintah dengan mengerahkan kekuatan militer terhadap lawan politik. Komite Koordinasi Lokal dibentuk untuk menawarkan perlindungan terhadap masyarakat atas berlangsungnya krisis politik, namun tidak mampu mencegah terjadinya perang saudara. Dalam hal ini, mayoritas angkatan bersenjata tetap loyal kepada pemerintah Assad, meskipun terjadi pemberontakan oleh beberapa tokoh militer.

Berbeda dengan pemberontakan yang dihadapi pemerintah pada 1979-1982, rezim Bashar Assad tidak memiliki kapasitas koersif untuk menumpas pemberontak. Penggunaan ideologi sektarian oleh Assad untuk memperkuat basis di antara komunitas Syi'ah Allawiah dan ketakutan akan Islam radikal serta kekerasan yang tak terkontrol, memaksa komunitas minoritas lainnya untuk menawarkan dukungannya kepada pemerintah. Kendati demikian, kekerasan terus-menerus terjadi, akibatnya sejumlah besar masyarakat menarik dukungannya terhadap pemerintah. Organisasi yang dibentuk sebagai wadah bagi berbagai kelompok oposisi, yakni Dewan Nasional Suriah (*Syrian National Council/SNC*), gagal membangun jaringan antar kelompok karena terjadi

perpecahan dalam tubuh SNC menjadi beberapa faksi. Termasuk IM yang berjuang di luar SNC demi masa depan Suriah. Terdapat pula beberapa kelompok oposisi lain yang tergabung dalam faksi Islam militan yang kuat dan beroperasi di hampir seluruh wilayah Suriah. Namun, terjadi perbedaan pendapat diantara faksi-faksi Islam seperti Jabha An-Nushra dan Ahrar Ash-Sham terkait dukungan terhadap *Islamic State in Iraq and Sham* (ISIS) (Ghafur 2014).

Menghadapi kritik atas kekejaman rezim terhadap kelompok oposisi, Assad menyetujui pemusnahan senjata kimia yang keberadaannya sempat dibantah. Senjata kimia sebenarnya bukan strategi militer utama, rezim Assad lebih banyak menggunakan bom dan tembakan artileri yang seringkali ditujukan ke target-target sipil, termasuk memblokir bantuan makanan dan kemanusiaan sebagai taktik perang. Tindakan ini mengakibatkan tewasnya 115.000 warga negara, 2 juta pengungsi, dan 5 juta *internally displaced person*. Akibatnya, Suriah memperoleh skor terendah dalam kebebasan sipil dan masuk dalam kategori negara tidak bebas menurut perhitungan Freedom in the World Report (2014) (lihat gambar 4).



Sumber Gambar 4: (Freedom House 2014)

Seperti halnya Suriah, Libya merupakan salah satu negara yang mengalami perang saudara setelah *Arab Uprising*. Libya saat ini termasuk ke dalam kategori negara gagal setelah jatuhnya rezim Khadafi. Hal ini dilihat dari cara perubahan rezim direalisasikan, dan aksi para politisi dan pemimpin milisi Libya. Setelah pembunuhan terhadap dirinya, Khadafi mewariskan kepada rakyat Libya sebuah negara yang tidak berfungsi, dengan institusi pemerintahan yang lemah dan sedikit bahkan ketiadaan masyarakat sosial. Trauma akibat okupasi di Afganistan dan Irak, negara-negara yang memberikan bantuan militer untuk perubahan rezim di Libya seperti Prancis, Inggris, dan AS, dituntut untuk membatasi keterlibatannya dalam hal bantuan militer ke Libya.

Warisan sejarah dari aksi NATO telah meninggalkan legitimasi palsu bagi rezim setelah Khadafi, serta kapasitas terbatas untuk memengaruhi politik dalam negeri Libya. Dewan Transisi Nasional Libya saat ini berupaya untuk memerintah Libya yang mengalami serangkaian defisiensi, defisit demokrasi, dan menghadapi pemisahan geografis serta pemisahan ideologi politik sekular-Islamis. Laporan dari International Crisis Group (ICG) memperkirakan bahwa kekuatan militer sesungguhnya dari Libya meliputi 100 milisi sipil yang terdiri dari 125.000 jiwa sipil bersenjata. Situasi pemerintahan yang lemah dan tidak memiliki legitimasi yang kuat untuk mengontrol ribuan milisi sipil, berjuang untuk menguasai kembali kekuatan militer dan otonomi wilayah geografis, bukanlah pertanda baik bagi transisi Libya (Dodge t.t).

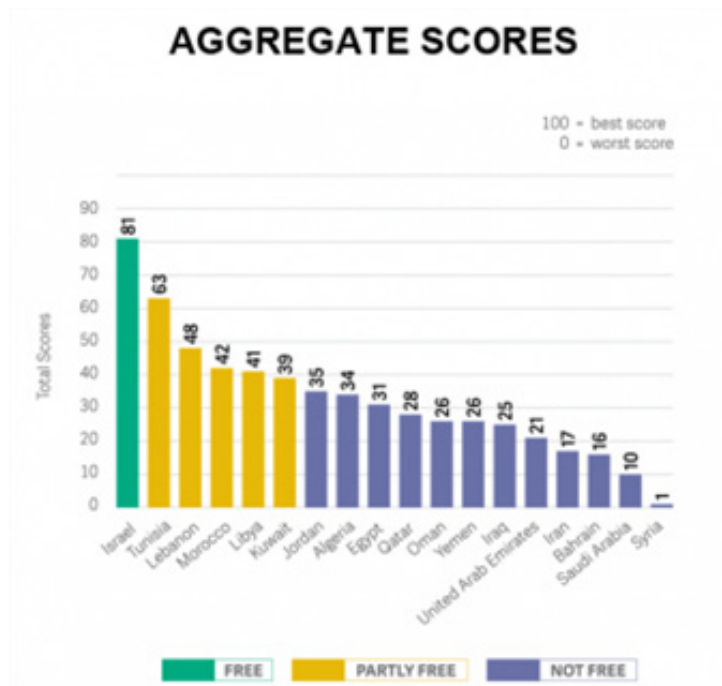
Pada tahun 2013, pemerintahan transisi Libya berjuang membentuk fondasi bagi terciptanya pemerintahan demokratis dan penegakan hukum. Pemerintahan transisi yang lemah juga harus menghadapi ancaman keamanan dan tantangan terhadap otoritasnya. Selain itu, di tengah tantangan keamanan yang sedemikian, pemerintahan transisi Libya berupaya keras menciptakan sistem konstitusional. Prosedur untuk memilih 60 anggota majelis yang bertugas menyusun *draft* konstitusi baru dibentuk pada bulan Juli 2013 oleh the General National Congress (GNC) dan komisi pemilihan umum mulai menerima nominasi kandidat di akhir tahun 2013.

Meskipun pemerintah dan GNC terus berupaya menyusun hukum dan undang-undang, kemampuan kedua pihak untuk mengimplementasikan keputusan sangat terbatas. Sementara itu, meningkatnya frustrasi di kalangan warga, khususnya terhadap banyaknya milisi sipil otonom, mengakibatkan terjadinya gelombang protes dan demonstrasi, yang berakhir dengan kekerasan antara demonstran dengan milisi di wilayah basis mereka. Juni 2013 di Benghazi, 32 orang tewas ketika warga memobilisasi protes terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh the Libya Shield 1 Brigade (Freedom House 2014). Pada November 2013 di Tripoli, 43 orang tewas ketika para demonstran menuntut penarikan mundur pasukan milisi regional yang berasal dari Zintan dan Misrata di ibukota. PM Ali Zeidan menjanjikan investigasi terhadap insiden itu, namun tidak ada tuntutan kriminal terhadap milisi yang terlibat.

Tantangan keamanan lainnya adalah serangan terhadap beberapa kedubes asing, penculikan Perdana Menteri, dan perampokan kendaraan di Sirte yang membawa uang \$55 juta milik Bank Sentral Libya (Freedom House 2014). Milisi regional, kelompok Islam bersenjata, aktor internasional, kelompok kriminal, dan penyelundup, turut mengancam keamanan di Libya. Tindakan pelecehan dan serangan terhadap perempuan yang berasal dari komunitas agama yang rapuh juga menjadi persoalan penting. Wilayah perbatasan di selatan – dimana perdagangan ilegal senjata, obat-obatan dan manusia merupakan hal yang biasa terjadi – berada di bawah situasi darurat militer sejak 2012.

Permasalahan politik menjadi ganjalan pemerintah yang berupaya mengakomodir tuntutan kedua belah pihak baik milisi maupun warga sipil. Independensi GNC juga mendapat tantangan ketika terjadi insiden pengepungan kementerian pemerintahan pada April dan Mei 2014 oleh milisi guna memaksa diberlakukannya Undang-Undang eksklusi politik. UU tersebut dikritisi karena terlalu melebar, berpotensi menghalangi mantan pejabat di era Khadafi memasuki kehidupan politik meskipun mereka telah bergabung dengan kelompok oposisi beberapa dekade lalu atau berkontribusi

terhadap kemenangan pihak pemberontak setelah revolusi 2011. Pada Oktober 2013, kelompok regional mendeklarasikan pemerintahan sendiri di wilayah utara yang kaya minyak, yakni Cyrenaica, dan mengumumkan pembentukan perusahaan minyak negara dan bank sentral sendiri pada November 2013. Kelompok milisi yang menginginkan federalisme telah menutup pelabuhan minyak, yang berkontribusi terhadap jatuhnya produksi minyak Libya ke titik terendah 10% dari kapasitas sebelumnya. Produksi minyak juga menurun akibat aktivitas milisi dan demonstrasi damai di berbagai wilayah Libya. Akibat kekacauan politik dan keamanan tersebut, berdasarkan laporan “Libya: Freedom in The World Report” (2014), Libya masuk dalam kategori negara bebas sebagian, dengan skor kebebasan yang rendah yakni 4.5, skor kebebasan sipil 5, dan skor hak-hak politik 4. Namun bila dibandingkan dengan Suriah, status dan skor Libya lebih baik (lihat gambar 5), karena masih terdapat upaya pemerintah transisi untuk membangun pemerintahan demokratis setelah rezim Khadafi.



Sumber Gambar 5 : (Freedom House 2014)

Kesimpulan

Sekalipun terjadi instabilitas di Suriah dan Libya, Tunisia dan Mesir, namun masih memberikan secercah harapan bagi masyarakat internasional terkait dengan gelombang demokrasi yang terjadi di Timur Tengah. Meski transisi demokrasi di Tunisia dan Mesir belum bisa dikatakan sebagai suatu keberhasilan, namun setidaknya kedua negara tersebut telah melakukan proses pembentukan pemerintahan yang stabil. Lebih lanjut, Tunisia dan Mesir saat ini merepresentasikan transisi politik menuju pemerintahan yang demokratis, meskipun terjadi penurunan komitmen terhadap demokrasi di kedua negara seperti terlihat dalam hasil survei demokrasi. Pemahaman transisi politik yang terjadi di dunia Arab bukanlah hal baru bagi Indonesia mengingat terjadinya transisi politik pada tahun 1998 yang berhasil menggulingkan pemerintahan otoriter Orde Baru. Sejak saat itu, Indonesia memasuki fase transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Jika dibandingkan dengan karakter transisi politik dunia Arab, corak politik Indonesia telah berhasil menjaga pemerintahan tetap dalam koridor demokrasi. Hal ini dapat dicermati dalam kesuksesan pemilu yang telah dilaksanakan secara demokratis sejak 1999 hingga 2014 dan memperoleh pengakuan dunia internasional.

Dalam konteks posisi agama dalam negara, meskipun mayoritas rakyat Indonesia menganut Islam, sejak berdirinya NKRI, Pancasila menjadi ideologi negara bukan Islam. Hal ini berbeda dengan negara-negara di dunia Arab yang sulit menahan godaan mencantumkan Islam sebagai agama negara dan hukum Islam (*syari'ah*) sebagai hukum nasional tanpa dilengkapi pedoman tentang batas dan cara kerja kelembagaan hukum Islam. Akibatnya, apabila pemerintah di dunia Arab terus bergulat pada wacana ideologi, maka tidak mustahil negara akan jatuh ke dalam arena konflik antara Islamis, liberal, dan nasionalis (militer) (Munhanif 2013).

Dibandingkan Mesir yang mengalami kemunduran demokrasi akibat kudeta militer sehingga membawa Mesir kembali ke rezim otoritarian, Indonesia mampu mencegah kembalinya

rezim otoritarian. Kemunduran demokrasi yang terjadi di berbagai negara yang berujung pada instabilitas politik dan perang saudara harus dijadikan peringatan bagi Indonesia untuk bekerja keras menjaga dan mempertahankan konsolidasi demokrasi. Apalagi setelah pemilu Indonesia 2014, kalau solusi politik masih sulit menghasilkan kompromi dua kubu di parlemen (Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat) akan mengarah pada pemerintahan yang terbelah. Penting pula untuk dicermati laporan *Freedom in The World Report* (2014), mengenai menurunnya posisi peringkat Indonesia dalam hal kebebasan sipil dari 3 menjadi 4 dan statusnya menurun dari negara bebas menjadi bebas sebagian akibat dikeluarkannya RUU Ormas pada 2 Juli 2013 yang dipandang membatasi aktivitas NGO dimana negara mengambil peran supervisi atas aktivitas NGO. Dalam konteks nasional, untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan *governable*, salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan merangkul seluruh lapisan kekuatan sosial dan kekuatan politik. Meskipun dalam proses tersebut akan ada pihak yang menang atau kalah, namun diharapkan kedua belah pihak akan saling melengkapi sehingga tidak terjadi perpecahan yang dapat mengancam keutuhan negara.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

Basyar, Hamdan, 2013. "Demokrasi dan Kekuatan Politik Islam di Mesir", dalam Indriana Kartini (ed), 2013. *Agama dan Demokrasi : Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir, dan Libya*. Laporan Penelitian. Jakarta : P2P LIPI.

Ghafur, M.Fakhry, 2014. "Problematisasi Kekuatan Politik Islam di Suriah: Dominasi Militer dan Konflik Sektarianisme", dalam M.Fakhry Ghafur, 2014. *Problematisasi Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair*. Laporan Penelitian. Jakarta: P2P LIPI.

Kartini, Indriana (ed), 2013. *Agama dan Demokrasi : Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir, dan Libya*. Laporan Penelitian. Jakarta: P2P LIPI.

Mashad, Dhurorudin, 2014. "Menelaah Politik Islam dan Demokrasi di Beberapa Negara Kasus : Catatan Penutup", dalam M.Fakhry Ghafur (ed), 2014. *Problematisasi Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair*. Laporan Penelitian. Jakarta: P2P LIPI.

Munhanif, Ali, 2013. *Politik Islam dan Masa Depan Demokrasi di Timur Tengah: Sebuah Tanggapan*. Makalah dalam Seminar Akhir. Jakarta: P2P LIPI.

O'Donnell, Guillermo & Schmitter, Philippe, 1986. *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore & London: John Hopkins University Press.

Artikel Jurnal dan Jurnal Elektronik

Stepan, Alfred, 2012. "Tunisia's Transition and The Twin Tolerations", *Journal of Democracy*, 23 (2).

Artikel dalam Media Massa

"Tunisia, Ennahda Mundur untuk Akhiri Krisis Politik",
Kompas, 30 September 2013.

Artikel Daring

Freedom House, 2014. *Middle East and North Africa Fact Sheet*.
[online] www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2014 [diakses 25 Desember 2014].

_____, 2014. *Freedom in The World Report 2014*.
[online] <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2014#.VKJRvI4ADA> [diakses 15 Desember 2014].

_____, 2014. *Libya : "Freedom in The World Report 2014*.
[online] <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/libya#.vsku3pmufw8> [diakses 11 April 2015].

Perry, Dan, 2013. *3 Years after Arab Spring, Democracy's Future in Middle East Still Uncertain*. [online] http://www.huffingtonpost.com/2013/10/05/arab-spring-democracy_n_4049414.html [diakses 12 November 2014].

Petrou, Michael, 2014. *The Place where the Middle East Uprising Began Adopts a Liberal Constitution*. [online] <http://www.macleans.ca/authors/michael-petrou/tunisia-is-becoming-the-lone-arab-spring-success-story/> [diakses 14 November 2014].

PewResearchCenter, 2014. *One Year after Morsi's Ouster, Divides Persist on El-Sisi, Muslim Brotherhood*. [online] <http://www.pewglobal.org/2014/05/22/one-year-after-morsis-ouster-divides-persist-on-el-sisi-muslim-brotherhood/> [diakses 25 Desember 2014].

_____, 2014. *Tunisian Confidence in Democracy Wanes*.
[online] <http://www.pewglobal.org/2014/10/15/tunisianconfidenceindemocracynwanes/> [diakses 25 Desember 2014].

